

RENCANA KERJA
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN POLDA KEPRI
TAHUN ANGGARAN 2016

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk setiap Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra K/L sesuai dengan Tupoksi pada sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada Tahun terakhir RPJMN yang sedang berjalan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan bahwa Tema RPJMN 2015-2019, yaitu : ***“Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian Berlandaskan Keunggulan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Serta Kemampuan Ilmu Dan Teknologi Yang Terus Meningkatkan”*** dengan sasaran pembangunan di Bidang Hankam Tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional dan Kamdagri.***

Untuk mengantisipasi berbagai bentuk hakekat ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan wilayah Polda Kepri pada tahun 2015, sesuai diamanatkan dalam pasal 33 Keputusan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja pada tingkat Kepolisian Daerah bahwa tugas Biro Perencanaan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda, memantau atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dilingkungan Polda, menerapkan Reformasi dan Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.

Dengan memperhatikan capaian kinerja Polda Kepri saat ini, dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan tingginya harapan masyarakat, serta dalam rangka mempercepat pembenahan Polri, maka Kapolda Kepulauan Riau menetapkan Visi sebagai berikut: "terwujudnya postur Polda Kepri yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat dan penyelenggara harkamtibmas, melalui penegakan hukum yang efektif, sinergi polisional proaktif serta terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan interdepartemen dalam rangka memantapkan Keamanan Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan perkiraan Intelijen T.A. 2015 merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Polda Kepulauan Riau T.A. 2015, meliputi perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Keamanan (Ipoleksosbud dan Kam).

a. Aspek Ideologi

- 1) Masyarakat Provinsi Kepri pada umumnya masih berpegang pada Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia, belum ada indikasi kelompok/ aliran yang mengarah pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila. Namun demikian masih adanya kelompok/suku terasing di beberapa wilayah perairan Kepri yang dinamakan suku laut karena tinggalnya diatas perahu yang terapung dilautan dan berada di pinggir-pinggir pulau wilayah Kepri yang kemungkinan besar belum memiliki pendidikan/ pengetahuan yang cukup tentang Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
- 2) Suku laut tersebut bahkan dikenal menganut animisme atau mengkeramatkan suatu benda atau daerah dikarenakan pengaruh minimnya fasilitas pengetahuan tentang keagamaan dan sifat turun temurun yang sudah membudaya. Dengan demikian salah satu nilai pancasila yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan YME masih belum terlaksana sepenuhnya. Namun setidaknya suku laut ini belum ada indikasi untuk melakukan upaya mendiskreditkan Pancasila ataupun membuat ideologi baru karena aktivitas utama hingga saat ini adalah melaut dan berburu di Hutan;
- 3) Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan - kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk menguasai beberapa titik/ lokasi usaha tertentu dengan tujuan melakukan dominasi dalam hal "pengamanan" sehingga sering berimplikasi pada terjadinya konflik horisontal yang dampaknya dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang seakan - akan berlatarbelakang SARA.

b. Aspek

b. Aspek Politik

- 1) Situasi politik nasional yang berimplikasi terhadap situasi wilayah Kepri adalah tuntutan buruh yang belum terselesaikan (HOSTUM & Jamkesmas), rencana kenaikan TDL, tawuran pelajar/mahasiswa yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia, kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah pusat dsb. Berbagai perkembangan politik tingkat nasional tersebut menimbulkan aksi solidaritas oleh kelompok tertentu di Kepri untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk dukungannya;
- 2) Secara umum situasi politik di Kepri cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. Meskipun terdapat beberapa kebijakan pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif namun masih dapat diatasi dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
- 3) Dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing;
- 4) Adanya pelaksanaan Pemilu Gubernur Kepri periode tahun 2015–2020. Berbagai program dan isu mulai dimunculkan pada saat menjelang pelaksanaan pemilihan khususnya krisis ekonomi yang terus memburuk, pengangguran lebih tinggi dari biasanya dan permasalahan–permasalahan di wilayah Kepri yang belum terselesaikan;
- 5) Munculnya kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang belum terdaftar secara resmi di instansi terkait, baik secara taktis maupun strategis bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Selain itu tidak sedikit yang menjadikan organisasi/ kelompok tersebut sebagai peluang untuk mata pencaharian, tentunya melalui praktek pungli bahkan ancaman/ pemerasan terhadap oknum pejabat pemerintah/ swasta;
- 6) Adanya

- 6) Adanya rencana pemekaran wilayah di Kepri seperti daerah Kabupaten Natuna, Bintan, Karimun dan Lingga. Adapun alasan pemekaran kabupaten yaitu menimbang besarnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

c. Sosial Ekonomi

- 1) Nilai tukar Rupiah yang fluktuatif terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dipengaruhi oleh perekonomian global dan sentimen akan kekhawatiran naiknya eskalasi politik baik nasional dan internasional. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap situasi ekonomi di Provinsi Kepri;
- 2) Letak Kepri yang strategis yaitu berdekatan dengan Singapura dan Malaysia berdampak pada perkembangan perekonomian setempat, banyaknya pasokan barang dari kedua negara tetangga tersebut cukup membantu kebutuhan masyarakat Kepri terutama bahan pokok, harganya pun lebih rendah bila dibandingkan dengan mendatangkan dari Pulau Jawa. Namun dampak negatifnya adalah banyaknya praktek penyelundupan yang masih marak terjadi di Kepri mengingat banyaknya pelabuhan tikus dan kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasannya;
- 3) Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Wilayah Kepri Khususnya Batam, Bintan dan Karimun dengan segala kemudahan/ fasilitas-fasilitas khusus tidak berjalan dengan baik karena para pengusaha di wilayah Kepri dibingungkan oleh landasan hukum FTZ yang masih tumpang tindih dengan sejumlah aturan lain, terutama kendala yang dihadapi adalah peran institusi Bea Cukai masih dominan dalam wilayah FTZ sehingga mengaburkan fungsi dan keutamaan kawasan FTZ. Hal tersebut dapat mengakibatkan penanam usaha terutama PMA akan menutup usahanya karena menganggap wilayah Kepri tidak kondusif;
- 4) Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Wilayah Kepri Khususnya Batam, Bintan dan Karimun dengan segala kemudahan/ fasilitas-fasilitas khusus tidak berjalan dengan baik karena para pengusaha di wilayah Kepri dibingungkan oleh *landasan hukum FTZ yang masih tumpang tindih dengan sejumlah aturan lain*, terutama kendala yang dihadapi adalah peran institusi Bea Cukai masih dominan dalam wilayah FTZ sehingga mengaburkan fungsi dan keutamaan kawasan FTZ. Hal tersebut dapat mengakibatkan penanam usaha terutama PMA akan menutup usahanya karena menganggap wilayah Kepri tidak kondusif;

5) Praktek

- 5) Praktek standarisasi dollar juga terjadi pada sebagian besar hotel berbintang baik di Batam atau di Lagoi Bintan yang tentunya menyalahi prosedur BI dan melemahkan daya beli masyarakat setempat;
- 6) Dampak adanya kenaikan harga barang impor dan krisis energi listrik di wilayah Kepri (Tanjungpinang, Bintan, Karimun dan Lingga) juga sangat mempengaruhi perkembangan investasi dan dunia usaha di daerah karena akan meningkatkan biaya operasional termasuk upah buruh, hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- 7) Permasalahan tambang di wilayah Kepri yaitu adanya para eksportir hasil tambang menentang terhadap peraturan larangan mengekspor bahan mentah hasil tambang. Alasannya, banyak eksportir tambang yang menjerit atas penerapan regulasi baru tersebut.

d. Sosial Budaya

- 1) Masih didapatinya sebagian kelompok Muslim tertentu yang mempunyai pemahaman berbeda terhadap berbagai keyakinan keagamaan menimbulkan disharmonisasi, sehingga memicu kerawanan munculnya konflik internal. Selain itu sengketa rumah ibadah baik itu dalam pembangunannya maupun yang tidak sesuai penggunaannya (bukan peruntukan) juga dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang berujung pada konflik SARA;
- 2) Masih didapatinya beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Hukum Polda Kepri. Menurut data Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat enam aliran yang dianggap sesat yaitu : Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Al-Qiyadah Al-Imamiah. Dari keenam aliran tersebut yang sudah terdeteksi di Kepri adalah Ahmadiyah dan Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. Namun demikian jika tidak ada langkah konkrit oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi hal tersebut maka dimungkinkan keberadaan aliran tersebut akan semakin meluas dan dampak kerawanan yang ditimbulkan juga semakin besar;

3) Masalah

- 3) Masalah perselisihan antara Buruh dengan Perusahaan di Kota Batam, Bintan dan Karimun sering terjadi antara lain masalah PHK, outsourcing, masalah UMK/UMP yang dianggap rendah dan hak-hak karyawan yang belum dipenuhi oleh pihak Management Perusahaan sehingga sering terjadi aksi mogok kerja Karyawan dan aksi Unjuk Rasa ke Instansi pemerintah (Pemprov, DPRD Provinsi/Kota, Pemkab/Pemko Batam, Disnaker untuk menyampaikan tuntutan mereka yang belum terpenuhi;
- 4) Masalah sengketa tanah dan penggusuran masih terjadi di beberapa daerah yang ada di wilayah Provinsi Kepri, diwarnai dengan aksi protes dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang didukung oleh berbagai pihak seperti mahasiswa dan LSM serta Ormas. Tidak sedikit masalah sengketa tanah/ lahan ini berujung pada konflik sosial yang melibatkan kelompok preman yang berlatar belakang kesukuan. Ada beberapa faktor penyebabnya baik itu sebagian masyarakat masih berpegang pada hukum adat/tanah ulayat yang berbenturan dengan hukum nasional, serta adanya keberpihakan dari oknum pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah daerah. Penyebab lainnya adalah adanya tumpang tindih perijinan lahan yang diduga karena unsur kurangnya pengawasan instansi terkait
- 5) Permasalahan pemberlakuan SK Menhut Nomor 463 Tahun 2013 yang salah satu butirnya mengubah 1.834 hektar lahan bukan hutan menjadi kawasan hutan di wilayah Kepri. Keresahan muncul karena areal yang masuk dalam zona hutan tersebut, hampir seluruhnya lahan ekonomis, seperti shipyard di Tanjunguncang, hingga kawasan bisnis tersibuk di Batam, yakni Nagoya. Total 213.272 hektar dari 25.260.100 hektar luas wilayah Kepri diubah statusnya.

e. Aspek Keamanan

- 1) Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polda Kepri masih kondusif, meskipun masih ada beberapa kasus kriminalitas yang terjadi khususnya di Kota Batam sebagai wilayah yang terpadat penduduknya dan memiliki permasalahan paling kompleks diantara wilayah lainnya di Kepri. Permasalahan kriminalitas di Batam umumnya adalah curas dan curat;

2) Perdagangan

- 2) Perdagangan narkoba; masuknya narkoba ke Kepri sebagian besar dari luar negeri yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand kemudian diselundupkan melalui beberapa alternatif diantaranya jalur laut melalui pelabuhan tikus yang masih kurang pengamanannya, jalur udara melalui bandara yang belum dilengkapi dengan alat pendeteksi khusus narkoba, jalur ekspedisi yang sedang marak digunakan dengan menggunakan pengalihan/penyesatan tanpa alamat pengirim kemudian ditransfer dari satu ekspedisi ke ekspedisi lainnya hingga ke tempat tujuan akhir untuk mempersulit pengungkapannya;
- 3) Masih ditemukannya kasus trafficking di wilayah Hukum Polda Kepri yang disebabkan faktor ekonomi para korban dan lemahnya pengawasan dokumen serta upaya penegakan hukum untuk menjaring pelaku utamanya sejak melalui proses perekrutan dari daerah asal, transportasi baik secara legal maupun ilegal serta eksploitasi yang mengarah kepada adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, perkawinan dan lain-lain;
- 4) Aksi teroris yang saat ini sedang mengincar personel Polri karena alasan balas dendam mengingat banyaknya kelompok mereka yang telah tertangkap oleh Polri, kelompok yang saat ini sedang gencar diburu oleh tim densus 88 sebagian besar merekrut kelompok pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan jauh dari perhatian orang tuanya terutama mempelajari pendidikan agama yang setengah-setengah. **Sasaran yang rawan dijadikan aksi teroris** baik itu penembakan, pelemparan bom/ granat, aksi bom bunuh diri dsb adalah Markas Polisi yang terkesan sepi personel pengamanannya, pos polisi lalu lintas, personel Polri yang berjaga sendiri / berkelompok dilapangan dsb.

2. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Birorena Polda Kepri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat dianalisa dari faktor intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu:

a. Kekuatan (Strenght)

- 1) Personel Birorena Polda Kepri saat ini jumlahnya 26 personel terdiri dari 24 personel Polri dan 2 personel PNS, memiliki semangat kerja dan dedikasi yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas Rorena dapat terselesaikan tepat pada waktunya;

2) adanya

2) adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rorena Polda Kepri berupa :

- a) Ranmor R4 : 1 unit;
- b) peralatan komputer : 16 unit;
- c) printer : 10 unit;
- d) Laptop : 7 unit;
- e) Telepon : 6 jaringan (1 Fax);
- f) OHP : 1 unit;
- g) Handy Talky (HT) : 1 unit; dan
- h) mesin fotocopy : 1 unit;
- i) Kamera : 1 Unit;

3) meningkatnya dukungan anggaran Rorena telah terdistribusi kepada para Kabag dan Kasubag, sehingga para Kabag dan Kasubag sejak dini telah membuat rencana kegiatan yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;

4) terpenuhinya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personel Birorena telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Dengan adanya Perkap 22 tahun 2010 yang dinyatakan berlaku terhitung tanggal 28 September 2010, maka jumlah kekuatan personel Rorena Polda Kepri belum memenuhi DSP sebanyak 48 orang, saat ini jumlah riil baru 26 orang (2 orang sedang Pendidikan) atau kurang 22 orang (terpenuhi 54%), sehingga pelaksanaan tugas belum dapat diselesaikan secara maksimal;

2) kurangnya jumlah personel yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dibidang perencanaan dari 26 orang hanya 7 orang yang memiliki dikjur bidang perencanaan dan 7 orang yang pernah mengikuti pelatihan fungsi perencanaan;

3) sarana prasarana yang ada saat ini belum memadai bila dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, sarana yang ada kondisinya kurang maksimal, misalnya pada saat-saat tertentu sering mengalami kerusakan;

4) belum tercukupi kebutuhan Rumah Dinas bagi anggota Rorena Polda Kepri, sebagian besar tempat tinggal personel berlokasi jauh dari Mapolda atau menyewa/mengontrak;

5) masih

- 5) masih terkendalanya dalam hal komunikasi dengan satuan kewilayahan, mengingat Alkom yang ada baik telepon, HT maupun alat komunikasi lainnya sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan, sehingga kecepatan dalam permintaan data maupun pengiriman data pendukung dalam proses perencanaan sangat terlambat.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) terjalinnya hubungan yang baik antar satker, memberikan peluang yang baik dalam rangka koordinasi pemenuhan data dukung untuk penyusunan produk-produk perencanaan, sehingga selesai tepat waktu;
- 2) adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat maupun dari instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas Polda Kepri, dapat menumbuhkan semangat anggota untuk terus meningkatkan kinerjanya baik yang bertugas dibidang pembinaan maupun yang bertugas dibidang operasional;
- 3) dukungan dan keterbukaan instansi pengelola keuangan Negara dalam hal ini Kanwil DJPB, KPPN wilayah kerja Kepri untuk selalu memberikan pencerahan mengenai berbagai ketentuan dan aplikasi baru mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, dapat memberikan motivasi positif bagi Polda Kepri khususnya Rorena untuk selalu tepat waktu dalam pengiriman LRA nya.

d. Ancaman/kendala (Threaties)

- 1) Keterbatasan sarana informasi dan komunikasi (jaringan telepon, faximile dan internet) di satwil kewilayahan khususnya wilayah yang jauh dari Mapolda Kepri seperti Polres Natuna dan Polres Lingga sehingga dapat mempengaruhi ketepatan laporan dan penyampaian informasi penting berkaitan dengan tugas-tugas Rorena Polda Kepri;
- 2) Keterbatasan jumlah SDM khususnya Rorena akan akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas yang semakin berat, karena harus merangkap tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab orang lain.

3. Identifikasi masalah

Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

a. Kuantitas

- a. Kuantitas dan Kualitas personel pengemban fungsi perencanaan dimasing-masing satuan kerja bila dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan belum memadai, sehingga kualitas produk-produk perencanaan sering kurang mengakomodir seluruh kepentingan fungsi;
- b. kegiatan supervisi dan asistensi ke satuan kerja tingkat kewilayahan dalam rangka pengecekan langsung terhadap kinerja fungsi perencanaan, sering terhambat dengan masalah cuaca;
- c. pelaksanaan rencana aksi program RBP di satker-satker belum optimal dalam pelaporan dan sering terlambat, hal ini disebabkan karena belum ditunjuknya secara khusus personel yang membidangi kegiatan RBP;
- d. belum terpenuhinya alokasi pagu anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan, sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Pelaksanaan tugas Rorena sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 pasal 33, sangatlah dipengaruhi oleh berbagai aspek perkembangan kehidupan masyarakat dan faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, oleh karena itu untuk menentukan arah yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya Rorena Polda Kepulauan Riau telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada T.A. 2015 sebagai berikut :

4. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Kepri

1) Visi

Terwujudnya postur SDM Polda Kepri yang unggul bermoral dan modern dalam pelayanan prima kepada masyarakat, melalui penegakan hukum yang efektif, sinergi polisional proaktif guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta terjalinnya kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi Kepulauan Riau.

2) Misi

- a) mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mewujudkan keamanan dan ketertiban yang semakin kondusif sampai dengan pulau terluar berpenghuni;
- b) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polda Kepri terutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;
- c) mewujudkan prinsip BETAH dalam rekrutmen anggota Polri dan rekrutmen jabatan terbuka;
- d) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat;
- e) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya;

f) menjamin

- f) menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan di wilayah Prov. Kepulauan Riau untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian;
- g) meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat sinergitas dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan;
- h) menjamin terlaksananya program kerja, terselenggaranya pengelolaan anggaran dan keuangan negara serta administrasi dan perbendaharaan yang transparan, profesional dan akuntabel.

b. Visi dan Misi Rorena Polda Kepri

1) Visi

Meningkatkan sinergitas Birorena dengan satker jajaran Polda Kepri, serta terjalinnya kemitraan dengan instansi terkait dalam bidang fungsi Perencanaan dan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pembinaan berlandaskan kegotong-royongan demi terwujudnya Harkamtibmas di wilayah Polda Kepulauan Riau.

2) Misi

- a) Melakukan penyusunan produk-produk perencanaan dan anggaran dengan melibatkan satker-satker jajaran Polda Kepri;
- b) Melaksanakan pengendalian terhadap program dan anggaran Satker jajaran Polda Kepri;
- c) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran Satker jajaran Polda Kepri dengan melibatkan fungsi pengawas Polda Kepri;
- d) Meningkatkan pelayanan pembinaan fungsi Perencanaan dan anggaran terhadap Satker-Satker jajaran Polda Kepri;
- e) Melakukan koordinasi dengan Satker/instansi terkait yang berhubungan dengan Fungsi Perencanaan, anggaran dan pengawasan;
- f) Meningkatkan pengembangan kesatuan di wilayah Polda Kepri;

g) mengoptimalkan

- g) Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri pada seluruh satker jajaran Polda Kepri.

5. Tujuan

a. Tujuan Polda Kepri

- 1) terwujudnya organisasi Polda Kepri yang *Good Governance dan clean Government*;
- 2) terwujudnya reformasi di Polda Kepri terhadap perubahan *mind set* dan *culture set*;
- 3) terwujudnya Polda Kepri yang mengutamakan tindakan proaktif dari pada tindakan reaktif;
- 4) terwujudnya Polda Kepri yang profesional, bermoral, modern dan unggul;
- 5) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN.

b. Tujuan Rorena Polda Kepri

- 1) terwujudnya organisasi Birorena Polda Kepri yang *Good Governance dan clean Government*;
- 2) terwujudnya reformasi di Birorena Polda Kepri terhadap perubahan *mind set* dan *culture set*;
- 3) terwujudnya personel Birorena Polda Kepri yang profesional, bermoral, modern dan unggul dalam bidang perencanaan dan anggaran.
- 4) Terwujudnya Zona Integritas Birorena Polda Kepri dalam mewujudkan WBK (wilayah bebas dari korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

6. Sasaran Prioritas

a. Sasaran Prioritas Polda Kepri T.A. 2016

- 1) terwujudnya kualitas dan kuantitas personel Polda Kepri melalui penyelenggaraan rekrutmen anggota Polri sesuai prinsip BETAH (Bersih, transparan, akuntabel dan humanis) untuk mewujudkan *zero complaint*;
- 2) meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan latihan dalam rangka mewujudkan postur Personel Polda Kepri,

khususnya

khususnya Polisi berseragam sebagai Pelopor revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;

- 3) menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polda Kepri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mendukung kebijakan pembentukan pengawasan yang independen;
- 4) meningkatnya kerja sama antar aparat penegak hukum terutama unsur CJS (*criminal justice system*);
- 5) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik didarat maupun diwilayah perairan;
- 6) meningkatnya partisipasi masyarakat melalui peran Bhabinkamtimas di desa/kelurahan;
- 7) tercapainya reformasi Birokrasi Polri melalui pelaksanaan Quick Wins Renstra Polda Kepri 2015-2019 ditingkat Polda dan kewilayahan;
- 8) meningkatnya kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung anggaran dan teknologi intelejen memadai dalam mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
- 9) meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan, serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, khususnya kasus-kasus premanisme, terorisme, korupsi dan Narkoba;

b. Sasaran Prioritas Rorena Polda Kepri T.A. 2016

- 1) Terlaksananya Musrenbang Polda Kepri Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani kebijakan teknis dan strategis Polda Kepri;
- 2) Terlaksananya Rapat kerja teknis bidang perencanaan dan anggaran;
- 3) Terlaksananya supervisi dan asistensi bidang perencanaan dan anggaran ke Satker jajaran Polda Kepri;
- 4) Terlaksananya analisa dan evaluasi terhadap pencapaian program kerja dan anggaran;
- 5) Terlaksananya koordinasi dengan fungsi pengawas Polda Kepri (Itwasda, Bidpropam dan Bidkeu) dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan program dan anggaran;

6) Terlaksananya.

- 6) Terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis, pedoman perencanaan dan anggaran;
- 7) Terlaksananya penelitian dan study kelayakan terhadap pengembangan satuan;
- 8) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana aksi Reformasi dan Birokrasi Polda Kepri;

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI T.A. 2016

7. Arah Kebijakan Polda Kepri T.A. 2016

- 1) optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polda;
- 2) mengusulkan pembangunan markas kepolisian baru terkait dengan pengembangan wilayah administratif, memelihara dan merawat markas kepolisian yang telah tergelar dalam rangka peningkatan pelayanan Kamtibmas yang unggul;
- 3) peningkatan kemampuan Polair dengan mengusulkan penambahan kapal (type A dan type B) yang dapat menjangkau pulau terluar dan wilayah terluar berpenghuni/ berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim;
- 4) melaksanakan rekrutmen anggota Polda Kepri dengan memperhatikan prinsip BETAH;
- 5) meningkatkan profesionalisme anggota Polda Kepri melalui pendidikan dan pelatihan;
- 6) mengusulkan peningkatan kesejahteraan personel Polda Kepri serta mengusulkan peningkatan alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka profesionalisme pelayanan Kamtibmas kepada masyarakat;
- 7) menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polda Kepri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 8) mengoptimalkan sinergi polisional dengan instansi terkait serta kerjasama dengan negara tetangga dalam pengamanan wilayah perbatasan;
- 9) meningkatkan kualitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan baik didarat maupun di laut;
- 10) melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat (*community policing*) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas;
- 11) penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kepri;
- 12) membangun kemampuan *back up* operasional di tingkat Polda dan Satwil dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi

(FlashPoint) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatisme dan konflik sosial;

- 13) memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai dalam rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak sosial;
- 14) pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara, dan berimplikasi kontinjensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarannya;
- 15) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan rasa aman melalui penggelaran Polisi berseragam.

8. Arah Kebijakan Rorena Polda Kepri T.A. 2016

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Birorena yang profesional, bermoral, dan modern dengan mengikutsertakan personel dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan kemampuan dibidang perencanaan dan anggaran yang dilaksanakan oleh pembina fungsi tingkat mabes.
- 2) Mengusulkan pembangunan/pengadaan sarana prasarana dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Rorena.
- 3) Menindaklanjuti usulan peningkatan alokasi anggaran Polda Kepulauan Riau secara proporsional guna meningkatkan pelayanan kamtibmas kepada masyarakat :
- 4) Meningkatkan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan asistensi dibidang perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih profesional dan akuntabel guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5) Mengoptimalkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kepulauan Riau guna terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul.
- 6) Membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran.
- 7) Menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polda.
- 8) Memantau atau memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) tingkat Polda dan kewilayahan.

9. Strategi Polda Kepulauan Riau T.A. 2016

1. optimalisasi pemanfaatan *assesment center* beserta aplikasinya dalam rangka pembinaan karier personel Polda Kepri;
2. melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Kepri melalui teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi dalam rangka pembinaan karier;
3. menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;
4. mengusulkan pengalokasian anggaran untuk pembangunan markas SPN, SPKT, Ditreskrimsus, Dipamobvit, Dittahti, Polair, rumah dinas dan jabatan Satbrimob, Polsek Bandara Hang Nadim Batam, Mako Polsubsektor Pulau terong, Pulau Kasu, Pulau lengkung (Polsek Belakang Padang), Mako Polsubsektor Sei pinang, Pasir Panjang, Pulau Bakong, Mentuda, Pulau Medang dan Batu Belobang (Polres Lingga);
5. meningkatkan kemampuan SDM Polda Kepri untuk mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan memperkuat Satuan Polair baik di tingkat Polda maupun kewilayahan;
6. mengusulkan peningkatan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta meningkatkan keamanan Perairan melalui penguatan Polsek yang memiliki wilayah perairan (pantai);
7. mengusulkan penambahan jumlah kapal : 1 (satu) tipe B dan 4 (empat) kapal tipe C;
8. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen personel Polda Kepri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal;
9. melaksanakan sosialisasi penerimaan Polri secara masive dengan kebijakan Polwan merekrut 2 calon terbaik dan bagi Polki untuk melakukan sosialisasi jarak radius 5 Km dari tempat tinggal serta secara masive melakukan sosialisasi untuk mendapatkan calon dari pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan;
10. menyelenggarakan seleksi berdasarkan prinsip BETAH terhadap calon peserta Sespimmen, PTIK, Sespimma, SIP, Diklat Pim IV dan III;
11. mempercepat pemberian rujukan ke tingkat lanjut (Rumah sakit) kepada peserta BPJS;

12. meningkatkan integritas anggota Polda Kepri dan membangun budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polda Kepri;
13. mengoptimalkan tim Internal anti korupsi baik di tingkat Polda dan Polres/ta melalui koordinasi dan kerja sama baik internal maupun eksternal pengembalian fungsi pengawasan;
14. melakukan pembaruan MoU yang sudah habis masa berlakunya;
15. pengembangan *Regional Traffic Manajemen Center* (RTMC) dan *Traffic Manajemen Center* (TMC) di satuan wilayah secara bertahap yang belum tergelar;
16. pemantauan arus kemacetan lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dan *black spot* dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
17. meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan SIM online dan samsat link untuk mempermudah masyarakat memperpanjang SIM dan STNK yang sudah habis masa berlakunya, perpanjangan SIM dan STNK bisa dilakukan diseluruh kota Kepulauan Riau;
18. menambah jumlah anggota Bhabinkamtibmas secara bertahap dalam rangka mewujudkan penggelaran satu polisi (Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan;
19. meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan memantapkan kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim hingga menyentuh daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;
20. mengusulkan pengalokasian anggaran pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan perlengkapannya untuk anggota Bhabinkamtibmas;
21. meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat dalam koordinasi dan kerja sama dengan pers/mass media dalam rangka peningkatan *public trust*/kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kepri;
22. meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horisontal) maupun penanganan konflik vertikal dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan serta penegakan hukum yang profesional dan proporsional;

23. mengoptimalkan

23. mengoptimalkan kekuatan cadangan (*stand by force*) pada kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan ke daerah rawan dengan sarana dan prasarana cepat baik melalui udara, laut maupun darat;
 24. meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda Kepri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polda Kepri dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai;
 25. mengusulkan kebutuhan Almatsus fungsi Intelijen kepada Kabaintelkam Polri berupa *portable monitoring field* 1 unit, *secure email* 1 unit, *smartphone* sebanyak 43 unit untuk jajaran Polsek;
 26. mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas pemberantasan korupsi, terorisme, *street crime*, pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), penambangan liar (*illegal mining*), kejahatan perbankan, TPPU, *cyber crime* termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal;
 27. meningkatkan kemampuan personel Polda Kepri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polda Kepri bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP) dan instansi terkait;
 28. menghadirkan anggota Polda Kepri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;
 29. meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas.
10. Strategi Birorena Polda Kepri T.A 2016
- 1) meningkatkan SDM pengemban fungsi perencanaan melalui kegiatan asistensi dan pelatihan;
 - 2) menyusun perencanaan dan penganggaran secara profesional dan proporsional dengan mendasari pada tantangan tugas dan kedudukan riil yang dihadapi;
 - 3) meningkatkan input data dan penyajian data pada sistem informasi manajemen dan teknologi Kepolisian yang aplikasinya tersedia di Birorena seperti SMAP, aplikasi belanja pegawai, simak BMN, RKA-K/L, dan aplikasi lainnya;
 - 4) menindaklanjuti usulan pemenuhan alat/alsus dan bangunan fasilitas Polda Kepulauan Riau untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - 5) membuat

- 5) membuat telahaan staf dalam rangka pengembangan organisasi dan saran penyebaran personel secara proporsional.
- 6) Meningkatkan persentase ketepatan waktu penyelesaian produk-produk perencanaan dan anggaran yang dilaksanakan oleh jajaran satker Polda Kepulauan Riau;
- 7) Mengefektifkan kegiatan asistensi dibidang pengelolaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel;
- 8) Mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RBP.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

11. Program dan kegiatan

Program Satker Rorena Polda Kepri pada T.A. 2016 melaksanakan 2 (Dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri, dengan komponen:
 - a) Pembayaran gaji dan tunjangan;
 - b) Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan subkomponen :
 - (1) Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh;
 - (2) Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi;
 - (3) Perawatan kendaraan bermotor Roda 4/6/10;
 - (4) Perbaikan peralatan kantor;
 - (5) Pengadaan peralatan/perengkapan kantor.
 - 2) Perencanaan dan penganggaran Kewilayahan, dengan komponen :
 - Dukungan operasional pertahanan dan keamanan, dengan subkomponen :
 - a) Penyusunan dan evaluasi LAKIP;
 - b) Kegiatan Musrenbang;
 - c) Sosialisasi

- c) Sosialisasi;
 - d) Pemeliharaan peremajaan Website;
 - e) Jasa Keamanan/Kebersihan;
 - f) Evaluasi/laporan kegiatan;
 - g) Pengawasan dan pembinaan;
 - h) Kegiatan pembinaan;
 - i) Dukungan Operasional Satker;
 - j) Quick wins.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Polri, dengan komponen:
- Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras :
 - 1) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10;
 - 2) Perbaikan peralatan kantor.

12. Usulan Pagu Indikatif

Sesuai rencana program dan kegiatan tersebut diatas, pengajuan Pagu Indikatif Rorena pada T.A. 2016, sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENDUKGAR PER GIAT	RENDUKGAR PER PROGRAM
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Polri lainnya		Rp. 3.452.432.000,-
	Kegiatan :		
	a. Dukungan Pelayanan internal perkantoran Polri	Rp. 2.140.718.000,-	
	b. Perencanaan dan penganggaran Kewilayahan	Rp 1.311.714.000,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Polri		Rp. 85.300.000,-
	- Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	Rp. 85.300.000,-	
JUMLAH			Rp. 3.537.732.000,-

13. Penutup

Demikian Rencana Kerja Satker Rorena Polda Kepulauan Riau T.A. 2016 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satker Rorena Polda Kepulauan Riau pada tahun 2016.

Ditetapkan di : Batam
pada tanggal : Juni 2015

KEPALA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
POLDA KEPULAUAN RIAU

Drs. LAMAZI, AS
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 62060428